



BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
NOMOR 248 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, perlu disusun rencana kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Rencana Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
  4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
  5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 726);
  6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723);
  7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-909/MK.02/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2022.**

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022 yang memuat rencana kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Renja BNPT Tahun 2022.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

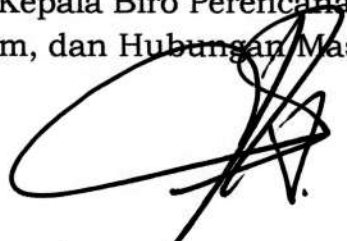
Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 12 November 2021

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan,  
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bambang Surono, Ak. M.M.



# **RENCANA KERJA**

---

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENANGGULANGAN TERORISME  
 NOMOR 248 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA KERJA BADAN NASIONAL  
 PENANGGULANGAN TERORISME  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>Bab I. Latar Belakang.....</b>	<b>5</b>
A. Kondisi Umum .....	5
B. Identifikasi Masalah .....	10
<b>Bab II. Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>13</b>
A. Visi dan Misi BNPT .....	13
B. Tujuan Jangka Menengah .....	13
1. Tujuan Jangka Menengah Nasional.....	13
2. Tujuan Jangka Menengah BNPT .....	14
C. Sasaran Prioritas .....	16
1. Sasaran Prioritas Nasional .....	16
2. Sasaran Prioritas BNPT .....	17
<b>Bab III. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan BNPT .....</b>	<b>19</b>
A. Program Prioritas Nasional .....	19
B. Arah Kebijakan dan Strategi BNPT T.A. 2022 .....	19
<b>Bab IV. Program, Kegiatan dan Pagu BNPT T.A. 2022.....</b>	<b>25</b>
A. Program dan Kegiatan BNPT .....	25
B. Pagu Alokasi Anggaran BNPT T.A. 2022 .....	26
C. Kegiatan Proiritas Nasional BNPT T.A. 2022 .....	29
<b>Bab V. Penutup.....</b>	<b>32</b>

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

#### A. Kondisi Umum

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2020 – 2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Renja merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap. Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara *promotif*, *preventif*, maupun *kuratif*, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* perlu dilanjutkan. Pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam hal penanggulangan terorisme.

Terorisme telah menjadi isu global yang dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya semakin mengkhawatirkan dilihat dari pola dan tergetnya. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Terorisme merupakan *extraordinary crime*, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 statusnya meningkat menjadi *serious crime* sehingga membutuhkan penanganan yang khusus, spesifik, dan terpusat.

Setiap aksi terorisme terdiri dari tiga unsur utama, yaitu ancaman, kerentanan, dan konsekuensi. Pola dan target serangannya mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pemanfaatan teknologi informasi, propaganda serta pembentukan tim kecil atau metode aksi

teror *lone wolf* merupakan sebagian elemen pergerakan teror yang harus diantisipasi.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan rencana strategis dan program kerja BNPT yang telah disusun perlu ditinjau kembali, baik dari segi penganggaran maupun pelaksanaan program penanggulangan terorisme. Beberapa isu terkait tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

1. Dinamika Ancaman Keamanan dari Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa fenomena baru yang terjadi dalam aksi teror. Secara internal, kelompok-kelompok teror yang saat ini aktif tengah berupaya memperkuat koneksi internalnya pasca penangkapan tokoh penting di dalam kelompoknya. Kekosongan tokoh ideologi dan motivator sangat mempengaruhi pergerakan dalam menjalankan aksi teror. Ancaman yang muncul dari kondisi tersebut terhadap keamanan adalah akan terjadi fenomena *leaderless* yaitu aksi teror yang dilakukan tanpa terlibat dalam sebuah kelompok tertentu dan fenomena *lone wolf*.

Ancaman yang kedua datang dari *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) yang turut membayangi keamanan Indonesia. Ancaman datang dari FTF Indonesia yang berposisi sebagai *returnees* maupun deportan. Kembalinya mereka ke wilayah Indonesia, akan menjadi ancaman mengingat mereka memiliki kemampuan kombatan yang nyata di medan pertempuran. Kendala verifikasi paspor yang disebabkan hilang atau rusaknya kartu identitas diri menjadi hambatan bagi pemerintah dalam melakukan verifikasi data. Data statistik menunjukkan tingginya angka WNI yang menjadi FTF merupakan sebuah pertanda bahwa WNI memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap terorisme yang dipropagandakan oleh ISIS. FTF WNI yang masih berada di wilayah Suriah dan Irak terbagi dalam beberapa kelompok yaitu kelompok dewasa usia produktif dan anak. Disamping ancaman teroris yang mengatasnamakan agama dalam melakukan aksinya, Indonesia juga memiliki ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua dan Papua

Barat yang pada tanggal 29 April 2021 ditetapkan sebagai teroris, sehingga penanggulangannya menjadi ranah BNPT.

Ancaman keamanan selanjutnya berasal dari bidang teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh kelompok jaringan untuk melakukan berbagai aktivitas terorisme. Teknologi informasi kini telah dimanfaatkan sebagai media propaganda utama dalam penyebaran paham radikal terorisme. Secara garis besar teknologi informasi digunakan oleh kelompok radikal terorisme untuk melakukan propaganda, perekrutan, penyediaan logistik, pembentukan paramiliter, perencanaan, pelaksanaan serangan, pelatihan, dan persembunyian. Melalui teknologi informasi ini, pergerakan kelompok teror akan semakin cepat dan semakin sulit terdeteksi. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat bahwa teknologi informasi memungkinkan para pengguna bertindak secara anonim dan mendapatkan berbagai macam layanan tanpa harus menggunakan identitas asli. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa justifikasi serangan teror akan memanfaatkan kondisi sosial, politik, hingga isu SARA mampu memunculkan potensi ancaman teror dan semakin dinamis mengarah pada konflik.

## 2. Penyebaran Paham Radikal Semakin Masif dan Beragam

Jaringan teror di Indonesia masih ada dan terus berkembang dengan pola rekrutmen anggota yang berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi. Terdapat tendensi bahwa jaringan teror berupaya memanfaatkan situasi wabah COVID-19 untuk merencanakan dan melaksanakan aksi teror. Hal ini sejalan dengan munculnya propaganda yang menyebut wabah COVID-19 sebagai kutukan dan tentara yang dikirim oleh Tuhan dalam memberantas kaum kafir di dunia.

Eksistensi radikalisme memiliki banyak pintu masuk baik secara langsung maupun daring. Generasi muda yang dalam usia produktif memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalangan generasi diluar usia produktif.

Saat ini terdapat 3 faktor yang mendorong semakin masifnya penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia, yang pertama adalah perkembangan situasi keamanan global. Situasi yang semakin tidak menentu di kawasan Timur Tengah sangat

mempengaruhi pola dan upaya penyebaran paham radikal terorisme. Faktor kedua adalah masuknya paham wahabi yang mengedepankan budaya Arab yang konservatif dan organisasi dengan mengatasnamakan agama tertentu yang mendorong timbulnya kelompok eksklusif dan sering menuduh orang lain yang tidak sama dengan mereka sebagai musuh atau kafir dan dapat diperangi. Faktor yang ketiga adalah ekonomi, banyak golongan masyarakat yang terjebak pada propaganda paham radikal karena dilandasi faktor ekonomi.

Penyebaran paham radikal terorisme yang terjadi di Indonesia sekarang ini dinilai sudah tidak mengenal tempat. Penyebaran sudah masuk kedalam lingkungan pendidikan, tempat ibadah, dan lingkungan pemerintahan yang mencakup instansi pemerintah dan BUMN. Saat ini media sosial dijadikan sebagai sarana penyebaran paham radikal terorisme. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 Indonesia didominasi oleh generasi milenial (kelahiran 1981 s.d 1996) dan gen Z (kelahiran 1997 s.d 2012), hal ini menjadi suatu tantangan yang nyata dalam upaya menangkal paham radikal terorisme yang disebarakan melalui media sosial, dengan kondisi tersebut Indonesia akan mengalami keuntungan demografi di tahun 2030 dimana jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan usia tidak produktif, sehingga pencegahan radikalisme untuk generasi muda perlu ditingkatkan.

### 3. COVID-19 dan Terorisme

Dengan ditetapkannya pandemi COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat, hal ini mempengaruhi strategi penanggulangan terorisme. Saat ini penanggulangan terorisme mengedepankan pencegahan melalui pendekatan *Soft Approach*. Pencegahan tersebut diimplementasikan melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018. Ketiga strategi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dengan cara koordinasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara langsung. Akan tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 strategi tersebut di atas sangat sulit dilaksanakan karena adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, BNPT perlu

menyusun strategi baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku di saat pandemi COVID-19. Penggunaan media sosial menjadi salah satu strategi dasar dalam pencegahan paham radikal guna menangkal penyebaran paham radikal dengan sasaran generasi muda.

#### 4. Keadaan Ekonomi Nasional

Seiring belum berakhirnya pandemi COVID-19 vaksinasi terus digencarkan pemerintah guna mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022. Agenda pemulihan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro RKP tahun 2022.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2022 masih menjadi fokus belanja pemerintah, dengan kemampuan keuangan negara yang terbatas. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kesehatan APBN dengan mengembalikan defisit APBN menjadi 3% dari PDB pada Tahun 2023, sesuai UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Kebijakan makro fiskal harus *responsive* untuk menjawab tantangan pembangunan dan percepatan pemulihan ekonomi, ketidakpastian ekonomi global, tantangan struktural, perubahan iklim dan disrupsi ekonomi digital) dan tantangan fiskal (penerimaan perlu dioptimalkan, risiko fiskal meningkat, ruang fiskal terbatas, fiskal harus konsolidatif) serta mendukung pencapaian target pembangunan.

Gambaran risiko dan tantangan ekonomi makro nasional pada tahun 2022 dihadapkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengendalian pandemi COVID-19;
- b. Pemulihan aktivitas ekonomi global;
- c. Perubahan harga komoditas global;
- d. Pemulihan dunia usaha;
- e. Pemulihan konsumsi domestik; dan
- f. Ruang terbatas stimulus fiskal dan moneter.

Arah kebijakan belanja K/L Tahun 2022 harus mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui penguatan *spending better*. Arah kebijakan belanja K/L Tahun 2022 sesuai dengan arahan Menteri Keuangan berdasarkan jenis belanja K/L adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Pengendalian belanja dengan tetap mempertahankan daya beli dan konsumsi aparatur negara.
- 2) Mendukung reformasi birokrasi dan penyesuaian dengan cara kerja baru yang lebih efisien dengan tetap mempertahankan produktivitas.

b. Belanja Barang

- 1) Efisiensi belanja barang operasional dan belanja non prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan IT.
- 2) Penyediaan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien.
- 3) Efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat (lebih fokus dan sinergi dengan pendanaan lainnya).

c. Belanja Modal

- 1) Mendukung pendanaan program prioritas dan strategis untuk pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas secara selektif.
- 2) Mendukung agenda digitalisasi dan sektor strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi.
- 3) Pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, dan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), serta permukiman kumuh perkotaan.

d. Bantuan Sosial

- 1) Melanjutkan penyaluran bantuan sosial reguler seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, bantuan premi PBI JKN.
- 2) Mendorong pelaksanaan integrasi program perlinsos secara bertahap, integrasi PKH dan PIP, integrasi komponen PKH lansia, dan disabilitas ke dalam program bantuan sosial lansia dan disabilitas.
- 3) Transformasi subsidi energi ke bantuan sosial.

B. Identifikasi Masalah

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pemenuhan target capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Struktur Kelembagaan yang belum ideal untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan;
2. Keterbatasan Anggaran Penanggulangan Terorisme;  
Anggaran BNPT masih belum ideal untuk melaksanakan program penanggulangan terorisme secara menyeluruh. Secara umum alokasi anggaran yang diterima BNPT setiap tahunnya relatif menurun. Melihat ruang lingkup tugas dan fungsi BNPT yang menanggulangi terorisme dari hulu sampai dengan hilir sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, maka BNPT perlu memiliki alokasi anggaran yang lebih besar dari sebelumnya guna mengefektifkan program penanggulangan terorisme.
3. Sarana dan Prasarana;  
Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E ayat (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut BNPT perlu memiliki sarana yang mumpuni dari segi kontruksi maupun teknologi.  
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah menyusun *blueprint* Pusat Analisis dan Pengendalia Krisis (Pusdalsis) pada tahun 2020, *blueprint* memuat keseluruhan perencanaan pengembangan Pusdalsis yang dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 beserta perkiraan kebutuhan biaya implementasinya. Berikut rencana kebutuhan biaya pembangunan Pusdalsis:

\*dalam ribuan rupiah

<b>Tahun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Biaya	72.664.207	73.000.000	48.000.000	50.500.000	50.000.000

Pada tahun 2021 pembangunan tahap awal PUSDALSIS dilaksanakan, akan tetapi pada tahun anggaran 2022 penetapan pagu alokasi anggaran tidak terdapat pos anggaran untuk pembangunan PUSDALSIS tahap selanjutnya.

Pada Pasal 43E ayat (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sampai saat ini BNPT belum memiliki kantor operasional di Ibu Kota, sehingga masih menempati kantor di Komplek *Indonesia Peace and Security Centre* (IPSC) yang seharusnya diperuntukan sebagai pusat pelatihan dan pusat deradikalisasi.

Pada tahun 2021 BNPT sudah mendapatkan aset seluas 1,7 hektar senilai Rp657 miliar di Jl. S Parman Jakarta Barat yang statusnya telah dialihkan menjadi aset milik BNPT sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 240/KN/2021 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Namun dalam pembangunan kantor operasional BNPT belum memiliki anggaran.

#### 4. Pengembangan Kompetensi SDM;

BNPT secara langsung diberikan amanat oleh Undang-Undang dalam hal penanggulangan terorisme, namun masih dihadapkan pada kendala kompetensi SDM. Hal ini dikarenakan pola pengembangan SDM belum memiliki *grand design* atas kebutuhan dan pengembangan kompetensi. Pola penanggulangan terorisme yang dilakukan dari hulu sampai ke hilir jelas membutuhkan personel dengan kompetensi yang tinggi. Saat ini BNPT memiliki 640 personel yang dapat diberikan diklat/pelatihan/pendidikan secara terjadwal untuk meningkatkan kompetensi dibidang yang mendukung kinerja unitnya dan/atau penanggulangan terorisme.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Visi dan Misi BNPT**

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa visi BNPT harus diselaraskan dengan visi Presiden RI. Visi BNPT dalam Renstra 2020-2024, yaitu “Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi ini selaras dan mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini bermakna bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bermuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam rangka mencapai Visinya, BNPT menjabarkan ke dalam 7 Misi, yaitu:

1. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasiskan penelitian;
2. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme;
3. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme;
4. Melaksanakan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal;
5. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
6. Meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme; dan
7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.

## B. Tujuan Jangka Menengah

### 1. Tujuan Jangka Menengah Nasional

sebagai Komitmen Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah menyadari, tindak pidana terorisme masih akan terus berlanjut untuk mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.

RPJMN 2020-2024 yang selanjutnya diterjemahkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

### 2. Tujuan Jangka Menengah BNPT

Tujuan jangka menengah BNPT tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Rencana Strategis BNPT tahun 2020-2024 disusun berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN. Renstra BNPT merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai serta upaya strategis hingga kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen Renstra juga akan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan BNPT dalam menyusun rencana strategis unit kerja terkait berdasarkan regulasi yang berlaku.

Dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme, BNPT mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sesuai

amanat Undang-undang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki fungsi:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- c. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Dalam menjalankan fungsinya BNPT memiliki tugas:

- a. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme dibidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
- b. Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
- c. Mengoordinasikan program pemulihan korban; dan
- d. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme dibidang kerja sama internasional.

Sasaran strategis yang telah disusun mempresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme. Di dalam Renstra BNPT tahun 2020-2024 terdapat 13 Sasaran Strategis (SS) dengan 15 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
1	Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme	1	Indeks Persepsi Keamanan Masyarakat dari Tindak Pidana Terorisme
		2	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>
2	Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	3	Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme
3	Menurunnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	4	Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional
4	Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme	5	Jumlah Kerugian (Materiil dan Non

			Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme
		6	Jumlah Korban Jiwa akibat Tindak Terorisme
5	Tersedianya Regulasi Penanggulangan Berbasis Penelitian Terorisme	7	Indeks <i>Judicial Reviu</i> Regulasi Penanggulangan Terorisme
6	Terselenggaranya Kerja Sama Internasional terkait Penanggulangan Terorisme di Tingkat Bilateral, Regional, dan Multilateral serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri	8	Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri
7	Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	9	Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap
8	Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Manghadapi Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme	10	Indeks Kesiapan Aparat Pemerintah
9	Terkendalinya Situasi Keamanan saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi	11	Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme
10	Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	12	Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme
11	Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan	13	Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan
12	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi	14	Indeks Deradikalisasi
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi (RBN) Nasional	15	Nilai RB BNPT

### C. Sasaran Prioritas

#### 1. Sasaran Prioritas Nasional

Tema pembangunan RKP tahun 2022 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Secara umum tema pembangunan tahun 2022

dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yaitu:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

## 2. Sasaran Prioritas BNPT

BNPT dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme yang akan ditempuh pada tahun 2022 adalah dengan fokus mendukung Prioritas Nasional ke 7 (tujuh) yaitu **“Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik”**. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 kebijakan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui penguatan integritas informasi dan komunikasi publik; penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerja sama pembangunan internasional, optimalisasi proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan *physical distancing*, serta pemulihan kinerja pelayanan publik.

Sesuai dengan penjabaran prioritas nasional maka strategi penanggulangan terorisme yang akan dilakukan BNPT pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasiskan penelitian;
- b. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme;
- c. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme;
- d. Melaksanakan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal;
- e. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- f. Meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme; dan
- g. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.

### **BAB III**

## **PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN ARAH KEBIJAKAN BNPT**

#### A. Program Prioritas Nasional

Strategi penyelesaian isu strategis pada Prioritas Nasional (PN) ke-7 **“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”**, dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 dilakukan melalui 5 (lima) Program Prioritas (PP) yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

BNPT mendukung PP ke-5 **“Menjaga stabilitas keamanan nasional”**. PP ini diturunkan ke dalam bentuk Kegiatan Prioritas (KP). Kegiatan Prioritas yang langsung didukung oleh BNPT adalah KP **“Penguatan Keamanan Dalam Negeri”**. Dalam Kegiatan Prioritas ini BNPT memiliki andil yang sangat besar karena menjadi instansi pelaksana pencapaian target indikator Indeks Risiko Terorisme (pelaku) dan indikator Indeks Risiko Terorisme (target).

#### B. Arah Kebijakan dan Strategi BNPT T.A.2022

Arah pengembangan penanggulangan terorisme dalam 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis BNPT, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu, penentuan arah penanggulangan terorisme di Indonesia juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Kerangka pikir pembentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BNPT diturunkan dari visi Indonesia dengan agenda-agenda prioritas nasional di dalamnya, sehingga arah penanggulangan terorisme di Indonesia selaras dengan koridor-koridor yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme, BNPT mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sesuai amanat Undang-undang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki fungsi:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
3. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Dalam menjalankan fungsinya BNPT memiliki tugas:

1. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
2. Mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
3. Mengoordinasikan program pemulihan korban; dan
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

Demi menjalankan misi yang mulia yaitu menjaga stabilitas keamanan Nasional, BNPT membentuk sistem kerja terintegrasi yang efektif dalam hal penanggulangan terorisme. Sesuai dengan arahan Kepala BNPT, bahwa seluruh keluarga besar BNPT harus berusaha mengimplementasikan budaya organisasi yang sesuai dengan akronim dari BNPT yaitu **Berintegritas, Nasionalisme, Profesional dan Terpuji**. Hal tersebut merupakan budaya kerja atau etos kerja yang positif dan maksimal agar tujuan organisasi dapat tercapai dan sukses dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, BNPT melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7, yaitu: "Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga", sehingga misi BNPT tahun 2020-2024 adalah Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme, melalui:

1. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian;
2. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme;

3. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme;
4. Melaksanakan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal;
5. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
6. Kerja sama Internasional dalam penanggulangan terorisme;
7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa penanggulangan terorisme tidak hanya mengandalkan penegakan hukum (*hard approach*), tetapi juga penanganan dan pencegahan melalui pendekatan lunak (*soft approach*) berbasis kesejahteraan. Salah satu wujud pendekatan kesejahteraan tersebut adalah dengan mendorong pengembangan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN).

KKTN adalah konsep penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan. Strategi program KKTN ini adalah deradikalisasi berbasis ekonomi yang memiliki fungsi deradikalisasi, ekonomi dan pariwisata. Dengan kata lain pengembangan KKTN bertujuan memacu kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kemandirian) sehingga dapat meminimalisasi gerakan radikal terorisme dengan transformasi *mindset*. Di samping itu KKTN merupakan strategi kolaborasi dalam penanggulangan terorisme dari hulu ke hilir, dimana prinsip utama KKTN adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan terpadu dan partisipasi masyarakat yang berbasis potensi sumber daya manusia lokal dan sumber daya alam di suatu kawasan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak keterlibatan target sasaran yang meliputi mantan napi teroris (napiter), tokoh kelompok radikal, korban, keluarga napiter, keluarga mantan napiter, keluarga korban, kelompok masyarakat, tokoh positif, dan masyarakat sekitar kawasan.

Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) tahap awal direncanakan di 26 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi. Sebagai *pilot project* pada tahun 2021 dilaksanakan di Kabupaten Malang dan Kota Bima. Tahapan selanjutnya pada tahun 2022 akan direncanakan secara bertahap

pembangunan KKTN di Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una. Pengembangan KKTN dilaksanakan dalam bentuk pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana dalam suatu kawasan yang akan menjadi pusat kegiatan dalam proses interaksi ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang akan dilaksanakan adalah pembentukan Warung NKRI. Pada pelaksanaannya Warung NKRI akan didirikan di setiap lokasi KKTN. Istilah WARUNG sendiri merupakan akronim dari Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan. Nama warung diambil karena secara fisik menggambarkan kesederhanaan dan merupakan tempat berkumpul dan berinteraksinya masyarakat. Sedangkan NKRI sendiri merupakan sebuah kesepakatan para pendiri bangsa, dimana hanya dengan persatuanlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat sehingga mampu mengusir penjajah dari kawasan nusantara. Atas dasar filosofi tersebut diharapkan Warung NKRI menjadi tempat atau wadah bagi semua kalangan masyarakat untuk berdialog, berdiskusi aktif dan non eksklusif dalam rangka merawat nilai-nilai kebangsaan dan empat pilar konsesus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Warung NKRI juga akan menjadi solusi dalam melawan narasi-narasi kebencian yang memecah belah bangsa melalui propaganda intoleransi, anarkisme, radikalisme, dan terorisme.

Pengembangan yang kedua adalah pembangunan non fisik yang berupa peningkatan kemampuan (*capacity building*) yang berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) dari penerima manfaat dalam upaya membangkitkan perekonomian kawasan.

Sasaran ke depannya KKTN menjadi strategi pendekatan lunak (*soft approach*) dalam bentuk wadah edukasi untuk belajar dan bekerja bersama guna meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi, yang dilakukan dalam rangka penanggulangan terorisme.

Perkembangan terorisme sebagai ancaman global, berbanding lurus dengan meningkatnya situasi yang mendukung munculnya ekstremisme berbasis kekerasan di berbagai negara. Dalam hal merespon permasalahan terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan sebuah rencana aksi nasional

guna menyelaraskan kegiatan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pada tahun 2021 disahkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024. RAN PE bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional.

RAN PE merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan terorisme yang mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Rencana aksi yang termuat dalam RAN PE merupakan serangkaian program yang terkoordinasi (*coordinated programmes*) yang akan dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga terkait guna memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan. RAN PE tidak hanya menysasar faktor-faktor pemicu, akan tetapi ditujukan untuk membangun ketahanan masyarakat secara umum, dalam menangkal ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam pelaksanaannya RAN PE mencakup 3 (tiga) pilar sebagai strategi, dan program utamanya yang meliputi, (1) Pilar Pencegahan yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; (2) Pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; dan (3) Pilar kemitraan dan kerja sama internasional. RAN PE akan diwujudkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
2. Partisipasi dan sinergisitas pelaksanaan program-program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, yang dilakukan baik oleh K/L, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya;
3. Kapasitas (pembinaan kemampuan) sumber daya manusia dibidang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;

4. Pengawasan, deteksi dini, dan cegah dini terhadap tindakan dan pesan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
5. Perhatian terhadap para korban tindak pidana terorisme dan perlindungan infrastruktur serta objek vital (*critical infrastructures*) lainnya.

Untuk melaksanakan kegiatan RAN PE sesuai dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 perlu dibentuk Sekretariat Bersama yang merupakan unit pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Bersama dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala BNPT selaku badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam pelaksanaan tugasnya sekretariat bersama RAN PE bertugas:

1. Mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga;
2. Mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PE;
3. Merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme pada tahun 2022 BNPT perlu dukungan anggaran yang tidak sedikit. Melihat struktur anggaran TA 2022 sesuai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran BNPT perlu mengusulkan tambahan anggaran dalam upaya penguatan penanggulangan terorisme

**BAB IV****PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU BNPT T.A. 2022****A. Program dan Kegiatan BNPT****1. Program Penanggulangan Terorisme****a. Sasaran Program**

- 1) Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia;
- 2) Menurunnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia;
- 3) Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme;
- 4) Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri;
- 5) Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap;
- 6) Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel;
- 7) Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme;
- 8) Meningkatnya kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme;
- 9) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme;
- 10) Terkendalinya situasi keamanan saat kejahatan terorisme terjadi;
- 11) Terlindunginya Aparat Penegak Hukum dalam menangani tindak pidana terorisme;
- 12) Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan;
- 13) Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi

**b. Kegiatan**

- 1) Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan;
- 2) Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan; dan
- 3) Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional.

## 2. Program Dukungan Manajemen

### a. Sasaran Program

- 1) Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;
- 2) Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama.

### b. Kegiatan

- 1) Dukungan Administrasi dan SDM;
- 2) Pengawasan Internal.

## B. Pagu Alokasi Anggaran BNPT T.A.2022

Pendanaan program dan kegiatan di lingkungan BNPT dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari rupiah murni. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-909/MK.02/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Pagu Anggaran BNPT ditetapkan sebesar **Rp453.867.874.000,00** (*empat ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Terorisme sebesar Rp272.044.637.000,00 (*dua ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. (5096.BHB.001) Pengawasan terhadap potensi tindak pidana terorisme Rp1.232.110.000,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah*);
  - b. (5096.BHB.002) Pelindungan Objek Vital, Transportasi, dan Lingkungan Rp3.291.614.000,00 (*tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah*);
  - c. (5097.BHB.001) Operasi Intelijen Jaringan Terorisme Rp51.211.809.000,00 (*lima puluh satu miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah*);
  - d. (5097.BHB.002) Operasi Pengendalian Krisis Rp7.008.300.000,00 (*tujuh miliar delapan juta tiga ratus ribu rupiah*);
  - e. (5096.QHB.001) Kegiatan Kontra Radikalisasi Rp56.687.173.000,00 (*lima puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

- f. (5096.PEB.001) Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Rp44.724.066.000,00 (*empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah*);
- g. (5096.BDC.001) Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme Rp6.996.009.000,00 (*enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ribu rupiah*);
- h. (5096.QDC.001) Deradikalisasi Terhadap Masyarakat Terpapar Paham Radikal Terorisme Rp43.020.088.000,00 (*empat puluh tiga miliar dua puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- i. (5097.AEA.001) Koordinasi Dalam Penggunaan Kekuatan Terkait Tindak Pidana Terorisme Rp2.001.600.000,00 (*dua miliar satu juta enam ratus ribu rupiah*);
- j. (5097.AEA.002) Kesiapan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Nasional Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- k. (5097.AEA.003) Pelindungan Apgakkum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Rp5.735.525.000,00 (*lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- l. (5097.PEA.001) Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional Rp7.205.000.000,00 (*tujuh miliar dua ratus lima juta rupiah*);
- m. (5097.PEA.002) Kasus Tindak Pidana Terorisme Yang Berkekuatan Hukum Tetap Rp14.075.993.000,00 (*empat belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);
- n. (5097.DCG.001) Pembinaan Aparat Pemerintah dalam Menghadapi Tindak Pidana Terorisme Rp9.627.426.000,00 (*sembilan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*);
- o. (5098.AEC.001) Pelaksanaan Kerja Sama Bilateral dalam Penanggulangan Terorisme Rp7.039.598.000,00 (*tujuh miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
- p. (5098.AEC.002) Pelaksanaan Kerja Sama Regional dan Multilateral dalam Penanggulangan Terorisme Rp5.926.954.000,00 (*lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
- q. (5098.ABE.001) Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional serta Penguatan Perangkat Hukum

Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri Rp5.761.372.000,00 (*lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp181.823.237.000,00 (*seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. (5099.PEA.001) Sasaran wilayah pelibatan secara terpadu kementerian dan lembaga K/L pelaksanaan program penanggulangan terorisme Rp25.749.678.000,00 (*dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
  - b. (5099.PEA.002) Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme Rp4.297.553.000,00 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*);
  - c. (5099.EBA.994.001) Gaji dan Tunjangan (Belanja Pegawai) Rp55.290.653.000,00 (*lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah*);
  - d. (5099.EBA.994.002) Operasional Perkantoran Rp33.774.268.000,00 (*tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);
  - e. (5099.EBD.952) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Rp4.544.200.000,00 (*empat miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*);
  - f. (5099.EBA.956) Layanan Manajemen BMN Rp640.458.000,00 (*enam ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);
  - g. (5099.EBA.962) Layanan Umum Rp8.048.270.000,00 (*delapan miliar empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
  - h. (5099.EBC.954) Layanan SDM Rp8.732.922.000,00 (*delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
  - i. (5099.EBA.957) Layanan Hukum Rp3.363.762.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*);

- j. (5099.EBA.960) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Rp2.448.899.000,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- k. (5099.EAI.001) Layanan Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Rp29.362.757.000,00 (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
- l. (5099.EBA.963) Layanan Data dan Informasi Rp2.061.381.000,00 (*dua miliar enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);
- m. (5099.EBD.955) Layanan Manajemen Keuangan Rp1.208.719.000,00 (*satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah*);
- n. (5729.EBD.965) Layanan Audit Internal Rp2.263.717.000,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah*).

#### C. Kegiatan Prioritas Nasional BNPT T.A. 2022

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, BNPT menetapkan Rincian Output (RO) prioritas nasional di tahun 2022 yang mendukung Proyek Prioritas (ProP) "Peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme" yaitu sebagai berikut:

1. Deradikalisasi Terhadap Masyarakat Terpapar Paham Radikal Terorisme;
2. Kegiatan Kontra Radikalisasi;
3. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT);
4. Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional;
5. Kasus Tindak Pidana Terorisme Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
6. Sasaran Wilayah Pelibatan Secara Terpadu Kementerian dan Lembaga K/L Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme; dan
7. Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme.

Ketujuh Rincian Output (RO) di atas ditetapkan sebagai Prioritas Nasional (PN) yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan Proyek Prioritas (ProP) "Peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme".

**RINCIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2022  
BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN**

K/L	Prog	Keg	RO	Program /Kegiatan/Proyek Prioritas	Rencana Tahun										
					Vol	Satuan	Pagu	Lokasi	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional			
113.01	BA			<b>Program Penanggulangan Terorisme</b>			<b>165.712.320</b>								
113.01	BA	5096	QDC.001	Deradikalisasi Terhadap Masyarakat Terpapar Paham Radikal Terorisme	125	Orang	43.020.088	Pusat	Peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			
113.01	BA	5096	QHB.002	Kegiatan Kontra Radikalisasi	56	Operasi	56.687.173	Pusat	Peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			
113.01	BA	5096	PEB.001	Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	35	Forum	44.724.066	Pusat	Peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			
113.01	BA	5097	PEA.001	Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	12	Kegiatan	7.205.000	Pusat	Peningkatan deradikalisasi dan	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Menjaga Stabilitas Pertahanan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan			

\*(dalam ribuan rupiah)



**Bab V**  
**Penutup**

Demikian Rencana Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan BNPT.

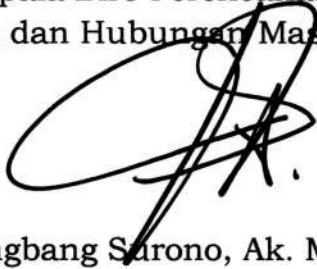
Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 12 November 2021

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan,  
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bambang Sarono, Ak. M.M.

## REKAP 1: K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

#### TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
2. VISI : Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.
3. MISI :
  1. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian.
  2. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam menegah terjadinya tindak pidana terorisme.
  3. Optimalisasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme.
  4. Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal.
  5. Deradikalisasi terhadap terasangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme.
  6. Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme.
  7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.

#### 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2022 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	195.759.551,0
	<b>Total</b>	195.759.551,0

#### 5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme		0,0
01.01	Indeks Persepsi Keamanan Masyarakat dari Tindak Pidana Terorisme	7	
01.02	Global Terrorism Index (GTI)	4,34	
02	Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia		101.411.239,0
02.03	Indeks potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah	0,8	
03	Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia		14.075.993,0
03.04	Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional	0,1	
04	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme		3.291.614,0
04.05	Jumlah Kerugian (materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme	18 Miliar	
04.06	Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Pidana Terorisme	50	
05	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian		3.363.762,0
05.07	Indeks Judicial review regulasi penanggulangan terorisme	0,15	

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE		TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
06	Terseleenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri		18.727.924,0
06.08	Indeks pelaksanaan kerjasama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral	0,9	
07	Meningkatnya Jumlah Jaringan terorisme yang berhasil dilungkap		52.443.919,0
07.09	Jumlah Jaringan terorisme yang berhasil dilungkap	3	
08	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme		17.332.426,0
08.10	Indeks kesiapsiagaan nasional	0,8	
09	Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi		9.009.900,0
09.11	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme	24	
10	Terlindungnya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme		5.735.525,0
10.12	Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme	160	
11	Meningkatnya Jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan		6.996.009,0
11.13	Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan	0,9	
12	Meningkatnya Jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradicalisasi		43.020.088,0
12.14	Indeks deradicalisasi	0,85	
13	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)		148.412.244,0
13.15	Nilai RB BNPT	72	
	<b>Total</b>		<b>423.820.643,0</b>

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024
113.BA	Program Penanggulangan Terorisme	272.044.637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272.044.637,0	279.184.575,0	286.624.109,0	3.736.124.947,0
113.WA	Program Dukungan Manajemen	181.823.237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181.823.237,0	183.397.430,0	186.611.891,0	189.952.495,0
	<b>Total</b>	<b>453.867.874,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>453.867.874,0</b>	<b>462.582.005,0</b>	<b>473.236.000,0</b>	<b>3.926.077.442,0</b>

Jakarta, November 2021

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Kepala Biro Perencanaan, Hukuman dan Perlindungan Masyarakat

Bambang Sutirno, Ak., M.M.  
NIP. 196705011989031001

**REKAP 2: PROGRAM K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : **BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERRORISME (BNPPT)**
- 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** :
- 02 - Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia
  - 03 - Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia
  - 04 - Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme
  - 06 - Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri
  - 07 - Meningkatkan jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap
  - 08 - Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme
  - 09 - Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi
  - 10 - Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme
  - 11 - Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan
  - 12 - Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi

**3. PROGRAM** : Program Penanggulangan Terorisme

<b>4. PRIORITAS NASIONAL</b>		<b>PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS</b>		<b>ALOKASI 2022 (RIBU)</b>
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			165.712.320,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional			165.712.320,0
	<b>Total</b>			165.712.320,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

<b>KODE</b>	<b>SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>ALOKASI 2022 (RIBU)</b>
01	Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia		101.411.239,0
01.01	Indeks potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah	0,8	
02	Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia		14.075.993,0
02.02	Indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional	0,1	
03	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme		3.291.614,0
03.03	Jumlah kerugian (materiil) akibat tindak pidana terorisme	18 Miliar	
03.04	Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme (jiwa)	50	
04	Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri		18.727.924,0

KODE		SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
04.05		Indeks pelaksanaan kerjasama internasional di tingkat bilateral, regional dan multilateral	0.9	
05		Meningkatnya Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap		1.232.110,0
05.06		Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	3	
06		Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel		51.211.809,0
06.07		Jumlah informasi intelijen jaringan terorisme yang diberikan tepat waktu dan terpercaya	105	
07		Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme		9.627.426,0
07.08		Indeks kesiapan aparat pemerintah	0.8	
08		Meningkatnya kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme		500.000,0
08.01		Indeks kesiapan sarana dan prasarana kesiapsiagaan nasional	0.8	
09		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme		7.205.000,0
09.10		Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	7	
10		Terkendalinya situasi keamanan saat kejahatan terorisme terjadi		9.009.900,0
10.11		Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme	1x24	
11		Terlindungnya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme		5.735.525,0
11.12		Jumlah Apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme	160	
12		Meningkatnya Jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan		6.996.009,0
12.13		Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan	0.9	
13		Meningkatnya Jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi		43.020.088,0
13.14		Indeks deradikalisasi	0.85	
Total				272.044.637,0

**6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM**

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Pencegahan Terorisme	155.951.060,0
01.01	Indeks Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Terorisme	
02	Penindakan Terorisme	97.365.653,0
02.01	Indeks Pelaksanaan Kegiatan Penindakan Terorisme	
03	Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme	18.727.924,0
03.01	Indeks Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme	
Total		272.044.637,0

**7. KEGIATAN DAN PENDANAAN**

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022													PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024	2025		
5096	Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan	155.951.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155.951.060,0	160.294.710,0	164.765.244,0	3.611.263.073,0		
5097	Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan	97.365.653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97.365.653,0	99.744.547,0	102.189.221,0	104.701.600,0		
5098	Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional	18.727.924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.727.924,0	19.145.318,0	19.669.644,0	20.160.274,0		
	<b>Total</b>	<b>272.044.637,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>272.044.637,0</b>	<b>279.184.575,0</b>	<b>286.624.109,0</b>	<b>3.736.124.947,0</b>		

Jakarta, November 2021

a/rn Menteri/ Kepala Lembaga

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Bambang Supriho, Ak., M.M.

NIP. 196705011989031001

**REKAP 2: PROGRAM K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 05 - Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian  
 13 - Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen

4. PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2022 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		30.047.231,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional		30.047.231,0
Total			30.047.231,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian			3.363.762,0
01.01	Indeks Judicial review regulasi penanggulangan terorisme		0.15	
02	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama			148.412.244,0
02.01	Total nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama		52.85	
02.02	Total nilai kriteria penguangkjt Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama		29.5	
02.03	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesekretaratan BNPT		1.2	
Total				151.776.006,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM		OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama		181.823.237,0
01.01	Indeks Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi BNPT		
02	Indeks Judicial Reviu Regulasi Penanggulangan Terorisme		0,0
02.01	Indeks Pelaksanaan Kegiatan Layanan Regulasi Penanggulangan Terorisme		
Total			181.823.237,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022													PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024	2025		
5099	Dukungan Administrasi dan SDM	179.559.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179.559.520,0	181.110.398,0	184.301.302,0	187.618.107,0		
5729	Pengawasan Internal BNPT	2.263.717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.263.717,0	2.287.032,0	2.310.589,0	2.334.388,0		
	<b>Total</b>	<b>181.823.237,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>181.823.237,0</b>	<b>183.397.430,0</b>	<b>186.611.891,0</b>	<b>189.952.495,0</b>		

Jakarta, November 2021

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Pengabdian Masyarakat

Bambang Sudono, Ak., M.M.  
NIP. 196705011989031001

**REKAP 3: KEGIATAN K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

2. PROGRAM : BA - Program Penanggulangan Terorisme

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

02 - Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia

03 - Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme

04 - Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum

05 - Meningkatkan jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap

06 - Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel

07 - Meningkatkan kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme

08 - Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme

09 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme

10 - Terkendalinya situasi keamanan saat kejahatan terorisme terjadi

11 - Terlindunginya Apakum dalam menangani tindak pidana terorisme terorisme

12 - Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan

13 - Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi

4. KEGIATAN : 5096 - Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 01 - Dit. Pencegahan; Dit. Perlindungan; Dit. Deradikalisasi

**6. SASARAN KEGIATAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi		43.020.088,0
01.01	Indeks deradikalisasi	0,85	
02	Terselenggaranya pencegahan potensi tindak pidana terorisme		101.411.239,0
02.01	Jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah	9	
03	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme		3.291.614,0
03.01	Jumlah kerugian materiil akibat tindak pidana terorisme	18 Miliar	
03.02	Jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme	50	
04	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan		6.996.009,0
04.01	Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan	0,9	
05	Meningkatnya jumlah jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap		1.232.110,0
05.01	Jumlah jaringan Terorisme yang berhasil diungkap	1	













KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANUARI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								273.666,0
<b>Total</b>											155.951.060,0

**B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)**

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022	TAHUN 2022	PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)								
				VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
								2023	2024	2025	2023	2024
01	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi			43.020,088,0		43.979,692,0	44.964,676,0	45.975,764,0				
01.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	125	Orang	43.020,088,0		43.979,692,0	44.964,676,0	45.975,764,0				
01.QDC.001	Deradikalisasi Terhadap Masyarakat Terpapar Paham Radikal Terorisme	125	Orang	43.020,088,0	133	137	137	43.979,692,0	44.964,676,0	45.975,764,0		
01.QDC.001.051	Melakukan deradikalisasi terhadap tersangka dan terdakwa di rutan	20,0	Orang	111.538,7	21,0	22,0	22,0	2.297,697,0	2.366,628,0	2.437,626,0		
01.QDC.001.052	Melakukan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di lapas	15,0	Orang	287.629,4	16,0	16,0	16,0	4.358.880,0	4.403.776,0	4.449.135,0		
01.QDC.001.053	Melakukan deradikalisasi melalui keluarga terdekat tersangka, terdakwa, narapidana terorisme (napiter)	15,0	Orang	259.859,1	16,0	16,0	16,0	3.938.035,0	3.978.597,0	4.019.576,0		
01.QDC.001.054	Koordinasi dengan K/L terkait dalam pelaksanaan khusus napiter	5,0	Kegiatan	1.126.757,6	5,0	5,0	5,0	5.691.816,0	5.750.442,0	5.809.671,0		
01.QDC.001.055	Melakukan deradikalisasi terhadap mantan napiter	15,0	Orang	72.209,9	16,0	16,0	16,0	1.094.304,0	1.105.576,0	1.116.963,0		
01.QDC.001.056	Melakukan deradikalisasi terhadap orang/kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme	15,0	Orang	394.467,2	16,0	16,0	16,0	6.094.518,0	6.277.353,0	6.465.674,0		
01.QDC.001.057	Melakukan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di lapas khusus	20,0	Orang	903.520,2	21,0	22,0	22,0	18.612.515,0	19.170.890,0	19.746.017,0		
01.QDC.001.058	Pengelolaan fasilitas pembinaan terpadu lintas K/L	25,0	Orang	74.905,6	27,0	27,0	27,0	1.891.927,0	1.911.414,0	1.931.102,0		
02	Terselenggaranya pencegahan potensi tindak pidana terorisme			101.411.239,0				104.453.557,0	107.587.164,0	110.814.780,0		
02.PEB	Forum	35	forum	44.724.066,0				46.065.770,0	47.447.744,0	48.871.177,0		
02.PEB.001	Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	35	forum	44.724.066,0	35	35	35	46.065.770,0	47.447.744,0	48.871.177,0		
02.PEB.001.051	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh	1,0	Forum	1.200,658,0	1,0	1,0	1,0	1.236,677,0	1.273.778,0	1.311.991,0		
02.PEB.001.052	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Bali	1,0	Forum	956,087,0	1,0	1,0	1,0	984,769,0	1.014.312,0	1.044.742,0		
02.PEB.001.053	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Bangka Belitung	1,0	Forum	888,540,0	1,0	1,0	1,0	915,196,0	942,652,0	970,931,0		
02.PEB.001.054	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Banten	1,0	Forum	831,387,0	1,0	1,0	1,0	856,328,0	882,018,0	908,479,0		
02.PEB.001.055	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Bengkulu	1,0	Forum	842,013,0	1,0	1,0	1,0	867,273,0	893,291,0	920,090,0		
02.PEB.001.056	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DI Yogyakarta	1,0	Forum	869,954,0	1,0	1,0	1,0	896,052,0	922,934,0	950,622,0		

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022				PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BILANGAN	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	
02.PEB.001.057	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta	1,0	Forum	7.538.424,0	1,0	1,0	1,0	7.764.576,0	7.997.514,0	8.237.439,0		
02.PEB.001.058	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo	1,0	Forum	928.468,0	1,0	1,0	1,0	956.322,0	985.011,0	1.014.562,0		
02.PEB.001.059	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jambi	1,0	Forum	878.493,0	1,0	1,0	1,0	904.847,0	931.993,0	959.953,0		
02.PEB.001.060	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Barat	1,0	Forum	852.537,0	1,0	1,0	1,0	878.113,0	904.456,0	931.590,0		
02.PEB.001.061	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah	1,0	Forum	1.035.175,0	1,0	1,0	1,0	1.066.230,0	1.098.217,0	1.131.163,0		
02.PEB.001.062	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur	1,0	Forum	904.560,0	1,0	1,0	1,0	931.696,0	959.647,0	988.437,0		
02.PEB.001.063	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Barat	1,0	Forum	869.054,0	1,0	1,0	1,0	895.125,0	921.979,0	949.638,0		
02.PEB.001.064	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan	1,0	Forum	873.940,0	1,0	1,0	1,0	900.158,0	927.162,0	954.977,0		
02.PEB.001.065	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Tengah	1,0	Forum	1.207.084,0	1,0	1,0	1,0	1.243.296,0	1.280.595,0	1.319.013,0		
02.PEB.001.066	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Timur	1,0	Forum	906.827,0	1,0	1,0	1,0	934.031,0	962.052,0	990.914,0		
02.PEB.001.067	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Utara	1,0	Forum	1.273.436,0	1,0	1,0	1,0	1.311.639,0	1.350.988,0	1.391.517,0		
02.PEB.001.068	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepulauan Riau	1,0	Forum	864.170,0	1,0	1,0	1,0	890.095,0	916.797,0	944.301,0		
02.PEB.001.069	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung	1,0	Forum	827.285,0	1,0	1,0	1,0	852.103,0	877.666,0	903.996,0		
02.PEB.001.070	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku	1,0	Forum	1.023.033,0	1,0	1,0	1,0	1.053.723,0	1.085.335,0	1.117.895,0		
02.PEB.001.071	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara	1,0	Forum	1.036.285,0	1,0	1,0	1,0	1.067.373,0	1.099.394,0	1.132.376,0		
02.PEB.001.072	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Nusa Tenggara Barat	1,0	Forum	1.219.627,0	1,0	1,0	1,0	1.256.215,0	1.293.902,0	1.332.719,0		
02.PEB.001.073	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Nusa Tenggara Timur	1,0	Forum	1.218.757,0	1,0	1,0	1,0	1.255.319,0	1.292.979,0	1.331.768,0		
02.PEB.001.074	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Papua	1,0	Forum	1.152.749,0	1,0	1,0	1,0	1.187.331,0	1.222.951,0	1.259.639,0		
02.PEB.001.075	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Papua Barat	1,0	Forum	1.189.572,0	1,0	1,0	1,0	1.225.259,0	1.262.016,0	1.299.877,0		
02.PEB.001.076	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Riau	1,0	Forum	862.632,0	1,0	1,0	1,0	888.510,0	915.166,0	942.621,0		
02.PEB.001.077	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Barat	1,0	Forum	935.052,0	1,0	1,0	1,0	963.103,0	991.996,0	1.021.756,0		
02.PEB.001.078	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Selatan	1,0	Forum	905.392,0	1,0	1,0	1,0	932.553,0	960.530,0	989.346,0		
02.PEB.001.079	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tengah	1,0	Forum	971.622,0	1,0	1,0	1,0	1.000.770,0	1.030.793,0	1.061.717,0		
02.PEB.001.080	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tenggara	1,0	Forum	902.908,0	1,0	1,0	1,0	929.995,0	957.895,0	986.631,0		
02.PEB.001.081	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Utara	1,0	Forum	1.201.753,0	1,0	1,0	1,0	1.237.805,0	1.274.939,0	1.313.187,0		
02.PEB.001.082	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat	1,0	Forum	1.095.727,0	1,0	1,0	1,0	1.128.598,0	1.162.456,0	1.197.330,0		

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022				PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
02.PEB.001.083	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan	1,0	Forum	864.137,0	864.137,0	1,0	1,0	1,0	890.061,0	916.762,0	944.265,0
02.PEB.001.084	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Utara	1,0	Forum	873.012,0	873.012,0	1,0	1,0	1,0	899.202,0	926.178,0	953.963,0
02.PEB.001.085	Survei Indeks Risiko Terorisme Melalui FKPT	1,0	Forum	4.723.716,0	4.723.716,0	1,0	1,0	1,0	4.865.427,0	5.011.390,0	5.161.732,0
02.QHB	Operasi Bidang Keamanan	56	operasi	56.687.173,0	56.687.173,0	56	56	56	58.387.787,0	60.139.420,0	61.943.603,0
02.QHB.001	Kegiatan Kontra Radikalisasi	56	operasi	56.687.173,0	56.687.173,0	56	56	56	58.387.787,0	60.139.420,0	61.943.603,0
02.QHB.001.051	Operasi Intelijen Pencegahan	30,0	Operasi	901.356,3	27.040.688,0	12,0	12,0	12,0	27.851.908,0	28.687.465,0	29.548.089,0
02.QHB.001.052	Operasi Intelijen Kontra Propaganda	26,0	Operasi	1.140.249,4	29.646.485,0	44,0	44,0	44,0	30.535.879,0	31.451.955,0	32.395.514,0
03	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme				3.291.614,0				3.386.501,0	3.484.194,0	3.584.779,0
03.BHB	Operasi Bidang Keamanan	7	operasi	3.291.614,0	3.291.614,0	7	7	7	3.386.501,0	3.484.194,0	3.584.779,0
03.BHB.002	Pelindungan Objek Vital, Transportasi, dan Lingkungan dari Tindak Pidana Terorisme	5	operasi	3.291.614,0	3.291.614,0	5	5	5	3.386.501,0	3.484.194,0	3.584.779,0
03.BHB.002.051	Koordinasi pengamanan terhadap obyek vital dan transportasi	1,0	Operasi	1.853.411,0	1.853.411,0	3,0	3,0	3,0	1.909.013,0	1.966.283,0	2.025.272,0
03.BHB.002.052	Koordinasi pengamanan terhadap lingkungan pemerintahan dan lingkungan umum	2,0	Operasi	621.101,5	1.242.203,0	3,0	3,0	3,0	1.279.469,0	1.317.853,0	1.357.388,0
03.BHB.002.053	Koordinasi pengamanan terhadap orang pada obyek vital dan transportasi	1,0	Operasi	50.000,0	50.000,0	3,0	3,0	3,0	50.515,0	51.035,0	51.561,0
03.BHB.002.054	Koordinasi pengamanan terhadap sarana prasarana dan orang di lingkungan pemerintahan dan lingkungan umum	2,0	Kegiatan	73.000,0	146.000,0	3,0	3,0	3,0	147.504,0	149.023,0	150.558,0
04	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan				6.996.009,0				7.205.888,0	7.422.065,0	7.449.541.391,0
04.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	23	Orang	6.996.009,0	6.996.009,0	23	23	23	7.205.888,0	7.422.065,0	7.449.541.391,0
04.BDC.001	Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme	23	Orang	6.996.009,0	6.996.009,0	24	25	25	7.205.888,0	7.422.065,0	7.449.541.391,0
04.BDC.001.051	Pelindungan dan pemulihan korban dan keluarga korban tindak pidana terorisme	23,0	Orang	167.088,4	3.843.033,0	23,0	23,0	23,0	3.958.323,0	4.077.073,0	4.199.385,0
04.BDC.001.052	Pemulihan kondisi wilayah dan sarana prasarana terdampak	23,0	Unit	137.085,9	3.152.976,0	23,0	23,0	23,0	3.247.565,0	3.344.992,0	3.445.342.006,0
05	Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap				1.232.110,0				1.269.072,0	1.307.145,0	1.346.359,0
05.BHB	Operasi Bidang Keamanan	7	operasi	1.232.110,0	1.232.110,0	7	7	7	1.269.072,0	1.307.145,0	1.346.359,0
05.BHB.001	Pengawasan terhadap potensi tindak pidana terorisme	2	operasi	1.232.110,0	1.232.110,0	3	3	3	1.269.072,0	1.307.145,0	1.346.359,0
05.BHB.001.051	Pengawasan terhadap Potensi Pelaku Tindak Pidana Terorisme	1,0	Operasi	958.444,0	958.444,0	3,0	3,0	3,0	987.197,0	1.016.813,0	1.047.317,0
05.BHB.001.052	Pengawasan terhadap pergerakan barang terkait potensi tindak pidana terorisme	1,0	Operasi	273.666,0	273.666,0	3,0	3,0	3,0	281.875,0	290.332,0	299.042,0
	Total				155.951.060,0	-	-	-	160.294.710,0	164.765.244,0	3.611.263.073,0





KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022												
			RP	PMBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL		
03.BHB.002.053	Koordinasi pengamanan terhadap orang pada obyek vital dan transportasi	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
03.BHB.002.054	Koordinasi pengamanan terhadap sarana prasarana dan orang di lingkungan pemerintahan dan lingkungan umum	Pendukung	146.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146.000,0
04	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan		6.996.009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.996.009,0
04.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		6.996.009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.996.009,0
04.BDC.001	Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme		6.996.009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.996.009,0
04.BDC.001.051	Pelindungan dan pemulihan korban dan keluarga korban tindak pidana terorisme	Utama	3.843.033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.843.033,0
04.BDC.001.052	Pemulihan kondisi wilayah dan sarana prasarana terdampak	Utama	3.152.976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.152.976,0
05	Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap		1.232.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232.110,0
05.BHB	Operasi Bidang Keamanan		1.232.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232.110,0
05.BHB.001	Pengawasan terhadap potensi tindak pidana terorisme		1.232.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.232.110,0
05.BHB.001.051	Pengawasan terhadap Potensi Tindak Pidana Terorisme	Utama	958.444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	958.444,0
05.BHB.001.052	Pengawasan terhadap pergerakan barang terkait potensi tindak pidana terorisme	Utama	273.666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273.666,0
	Total		155.951.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155.951.060,0

Jakarta, November 2021

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Kepala Biro Perencanaan, Hukuman dan Hubungan Masyarakat

Bambang Surono, Ak., M.M.  
NIP. 196705011989031001

**REKAP 3: KEGIATAN K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : **BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)**

**2. PROGRAM** : **BA - Program Penanggulangan Terorisme**

**3. SASARAN PROGRAM** :

- 01 - Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
- 02 - Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia
- 03 - Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme
- 04 - Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri
- 05 - Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap
- 06 - Tersedianya Informasi Intelijen Jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel
- 07 - Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme
- 08 - Meningkatnya kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme
- 09 - Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme
- 10 - Terkendalinya situasi keamanan saat kejahatan terorisme terjadi
- 11 - Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme terorisme
- 12 - Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan
- 13 - Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradicalisasi

**4. KEGIATAN** : **5097 - Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan**

**5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)** : **02 - Dit. Penindakan; Dit. Pembinaan Kemampuan; Dit. Penegakan Hukum**

**6. SASARAN KEGIATAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme		9.627.426,0
01.01	Indeks kesiapan aparat pemerintah	0,8	
02	Meningkatnya kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku		2.001.600,0
02.01	Rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman	70	
03	Tersedianya informasi intelijen terorisme yang tepat dan reliabel		51.211.809,0
03.01	Jumlah informasi intelijen jaringan terorisme yang diberikan tepat waktu dan terpercaya	105	
04	Meningkatnya kesiapan sarpras untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme		500.000,0
04.01	Indeks kesiapan Sarpras kesiapsiagaan nasional	0,8	
05	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme dan Menurunnya jumlah kasus tindak pidana terorisme di Indonesia		7.205.000,0
05.01	Indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	7	





KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (Rp RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
06.BHB	Operasi Bidang Keamanan										7.008.300,0
06.BHB.002	Operasi Pengendalian Krisis								000 - Bukan Tematik		7.008.300,0
	051 - Operasi Intelijen terkait pengembalian situasi kondusif pasca tindak pidana terorisme										7.008.300,0
07	Menurunnya jumlah kasus tindak pidana terorisme di Indonesia	Pusat	Pusat								7.008.300,0
07.PEA	Koordinasi										14.075.993,0
07.PEA.002	Kasus Tindak Pidana Terorisme Yang Berkekuatan Hukum Tetap								000 - Bukan Tematik		14.075.993,0
	051 - Koordinasi penegakan hukum tindak pidana terorisme hingga berkekuatan hukum tetap										11.062.978,0
	052 - Melakukan analisis dan evaluasi terkait penegakan hukum tindak pidana terorisme	Pusat	Pusat								11.062.978,0
08	Meningkatnya perlindungan terhadap Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme										3.013.015,0
08.AEA	Koordinasi										3.013.015,0
08.AEA.003	Pelindungan Apgakum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme								000 - Bukan Tematik		5.735.525,0
	051 - Koordinasi dalam perlindungan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme										5.735.525,0
		Pusat	Pusat								5.735.525,0
											97.365.653,0
	<b>Total</b>										<b>97.365.653,0</b>

**B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAN MAJU)**

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme				9.627.426,0				9.916.248,0	10.213.735,0	10.520.148,0
01.DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	690	Orang/Kegiatan		9.627.426,0				9.916.248,0	10.213.735,0	10.520.148,0
01.DCG.001	Pembinaan Aparat Pemerintah Dalam Menghadapi Tindak Pidana Terorisme	690	Orang		9.627.426,0	790	790	790	9.916.248,0	10.213.735,0	10.520.148,0
01.DCG.001.051	Pelatihan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi tindak pidana terorisme untuk aparat pemerintah	690,0	Orang	7.069,3	4.877.837,0	450,0	450,0	450,0	5.024.172,0	5.174.897,0	5.330.144,0
01.DCG.001.052	Mengembangkan sistem operasi dalam menghadapi tindak pidana terorisme	4,0	NSPK	1.187.397,3	4.749.589,0	4,0	4,0	4,0	4.892.076,0	5.038.838,0	5.190.004,0
02	Meningkatnya kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku				2.001.600,0				2.061.648,0	2.123.497,0	2.187.202,0
02.AEA	Koordinasi	23	kegiatan		2.001.600,0				2.061.648,0	2.123.497,0	2.187.202,0
02.AEA.001	Koordinasi Dalam Penggunaan Kekuatan Terkait Tindak Pidana Terorisme	5	kegiatan		2.001.600,0	5	5	5	2.061.648,0	2.123.497,0	2.187.202,0
02.AEA.001.051	Koordinasi dalam penggunaan kekuatan terkait tindak pidana terorisme	5,0	Kegiatan	400.320,0	2.001.600,0	4,0	4,0	4,0	2.061.648,0	2.123.497,0	2.187.202,0
03	Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan reliabel				51.211.809,0				52.748.163,0	54.330.607,0	55.960.526,0
03.BHB	Operasi Bidang Keamanan	60	operasi		51.211.809,0				52.748.163,0	54.330.607,0	55.960.526,0
03.BHB.001	Operasi Intelijen Jaringan Terorisme	55	operasi		51.211.809,0	55	55	55	52.748.163,0	54.330.607,0	55.960.526,0
03.BHB.001.051	Operasi intelijen jaringan terorisme nasional	51,0	Operasi	983.954,4	50.181.674,0	51,0	51,0	51,0	51.687.124,0	53.237.737,0	54.834.870,0
03.BHB.001.053	Mengumpulkan informasi intelijen terkait terorisme secara digital	6,0	Operasi	171.689,2	1.030.135,0	6,0	7,0	7,0	1.061.039,0	1.092.870,0	1.125.656,0
04	Meningkatnya kesiapan sarpras untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme				500.000,0				505.150,0	510.353,0	515.610,0
04.AEA	Koordinasi	23	kegiatan		500.000,0				505.150,0	510.353,0	515.610,0
04.AEA.002	Kesiapan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Nasional	3	kegiatan		500.000,0	3	3	3	505.150,0	510.353,0	515.610,0
04.AEA.002.051	Kesiapan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Nasional	3,0	Kegiatan	166.666,7	500.000,0	3,0	4,0	4,0	505.150,0	510.353,0	515.610,0
05	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme dan Menurunnya jumlah kasus tindak pidana terorisme di Indonesia				7.205.000,0				7.279.212,0	7.354.187,0	7.429.936,0
05.PEA	Koordinasi	122	kegiatan		7.205.000,0				7.279.212,0	7.354.187,0	7.429.936,0
05.PEA.001	Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	12	kegiatan		7.205.000,0	12	12	12	7.279.212,0	7.354.187,0	7.429.936,0





KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022												
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL		
07.PEA.002.052	Melakukan analisis dan evaluasi terkait penegakan hukum tindak pidana terorisme	Utama	3.013.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.013.015,0
08	Meningkatnya perlindungan terhadap Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme		5.735.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.735.525,0
08.AEA	Koordinasi		5.735.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.735.525,0
08.AEA.003	Pelindungan Apgakum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme		5.735.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.735.525,0
08.AEA.003.051	Koordinasi dalam pelindungan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme	Utama	5.735.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.735.525,0
	<b>Total</b>		<b>97.365.653,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97.365.653,0</b>

Jakarta, November 2021

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Bambang Suliono, Ak., M.M.  
NIP. 196705011989031001

## REKAP 3: KEGIATAN K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

#### TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

2. PROGRAM : BA - Program Penanggulangan Terorisme

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

02 - Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia

03 - Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme

04 - Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri

05 - Meningkatkan jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap

06 - Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel

07 - Meningkatkan kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme

08 - Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme

09 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme

10 - Terkendalinya situasi keamanan saat kejahatan terorisme terjadi

11 - Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme terorisme

12 - Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan

13 - Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideraskalisasi

4. KEGIATAN : 5098 - Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 03 - Dit. Kerjasama Bilateral; Dit. Kerjasama Regional dan Multilateral; Dit. Konvensi dan Perangkat Hukum Internasional

#### 6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya jumlah kerjasama bilateral terkait penanggulangan terorisme		7.039.598,0
01.01	Indeks kerjasama bilateral	0,9	
02	Meningkatnya jumlah kerjasama regional dan multilateral terkait penanggulangan terorisme		5.926.954,0
02.01	Indeks kerjasama regional dan multilateral	0,9	
03	Meningkatnya partisipasi aktif BNPT di forum penanggulangan terorisme internasional serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri		5.761.372,0
03.01	Tingkat partisipasi aktif BNPT di forum penanggulangan terorisme internasional	0,95	
	Total		18.727.924,0

#### 7. RINCIAN KEGIATAN

##### A. PEMETAN KEGIATAN



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03	Meningkatnya partisipasi aktif BNPT di forum penanggulangan terorisme internasional serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri										5.761.372,0
03.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan										5.761.372,0
03.ABE.001	Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri								000 - Bukan Tematik		5.761.372,0
	051 - Partisipasi aktif dalam konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme Internasional										2.808.807,0
		Pusat	Pusat								2.808.807,0
	052 - Partisipasi aktif dalam upaya perlindungan WNI dari tindak pidana terorisme										1.457.133,0
		Pusat	Pusat								1.457.133,0
	053 - Partisipasi aktif dalam upaya perlindungan kepentingan nasional dari tindak pidana terorisme										1.495.432,0
		Pusat	Pusat								1.495.432,0
											18.727.924,0
											Total

**B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)**

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022				PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya jumlah kerjasama bilateral terkait penanggulangan terorisme				7.039.598,0				7.164.510,0	7.388.175,0	7.569.732,0
01.AEC	Kerjasama	16	Kesepakatan/Dokumen/Kegiatan		7.039.598,0				7.164.510,0	7.388.175,0	7.569.732,0
01.AEC.001	Kerjasama Bilateral Dalam Penanggulangan Terorisme	8	Kesepakatan		7.039.598,0	9	9	9	7.164.510,0	7.388.175,0	7.569.732,0
01.AEC.001.051	Menyepakati perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	1,0	Kesepakatan	568.467,0	568.467,0	2,0	2,0	2,0	527.322,0	580.238,0	586.214,0
01.AEC.001.052	Pelaksanaan kerjasama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	3,0	Kesepakatan	475.065,3	1.425.196,0	3,0	3,0	3,0	1.439.876,0	1.454.706,0	1.469.690,0
01.AEC.001.053	Menyepakati perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	1,0	Kesepakatan	423.563,0	423.563,0	1,0	1,0	1,0	436.269,0	449.357,0	462.838,0
01.AEC.001.054	Pelaksanaan kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	3,0	Kesepakatan	1.540.790,7	4.622.372,0	3,0	3,0	3,0	4.761.043,0	4.903.874,0	5.050.990,0



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022												
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL		
01.AEC.001.052	Pelaksanaan kerjasama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	Utama	1.425.196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.425.196,0
01.AEC.001.053	Menyepakati perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	Utama	423.563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423.563,0
01.AEC.001.054	Pelaksanaan kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	Utama	4.622.372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.622.372,0
02	Meningkatnya Jumlah kerjasama regional dan multilateral terkait penanggulangan terorisme		5.926.954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.926.954,0
02.AEC	Kerja sama		5.926.954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.926.954,0
02.AEC.002	Kerja Sama Regional dan Multilateral Dalam Penanggulangan Terorisme		5.926.954,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.926.954,0
02.AEC.002.051	Menyepakati kerjasama regional	Utama	1.302.743,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.302.743,0
02.AEC.002.052	Pelaksanaan kerjasama regional	Utama	1.824.781,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.824.781,0
02.AEC.002.053	Menyepakati kerjasama multilateral	Utama	1.549.168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.549.168,0
02.AEC.002.054	Pelaksanaan kerjasama multilateral	Utama	1.250.262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250.262,0
03	Meningkatnya partisipasi aktif BNPT di forum penanggulangan terorisme internasional serta penguatan perangkat hukum Internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri		5.761.372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.761.372,0
03.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan		5.761.372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.761.372,0
03.ABE.001	Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri		5.761.372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.761.372,0
03.ABE.001.051	Partisipasi aktif dalam konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme Internasional	Utama	2.808.807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.808.807,0
03.ABE.001.052	Partisipasi aktif dalam upaya perlindungan WNI dari tindak pidana terorisme	Pendukung	1.457.133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457.133,0
03.ABE.001.053	Partisipasi aktif dalam upaya perlindungan kepentingan nasional dari tindak pidana terorisme	Pendukung	1.495.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.495.432,0
	Total		18.727.924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.727.924,0

Jakarta, November 2021

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Bambang Setiono, Ak., M.M.  
NIP. 196705011989031001

**REKAP 3: KEGIATAN K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian  
 02 - Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama
4. KEGIATAN : 5099 - Dukungan Administrasi dan SDM
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 04 - Biro Umum; Biro Perencanaan & Hub Antar Lembaga; Inspektorat

**6. SASARAN KEGIATAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian		3.363.762,0
01.01	Nilai komponen AKIP BNPT kecuali komponen evaluasi Internal		
02	Terwujudnya BNPT yang akuntabel sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan Hukum dan Humas		2.061.381,0
02.01	Nilai AKIP BNPT kecuali komponen evaluasi Internal	8	
03	Terselenggaranya layanan publik BNPT yang prima		29.362.757,0
03.01	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BNPT	3,6	
04	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Hukum dan Humas		4.544.200,0
04.01	Nilai penguatan akuntabilitas	2,5	
04.02	Nilai penataan peraturan perundang-undangan	2,8	
04.03	Nilai peningkatan kualitas layanan publik	3,52	
05	Terselenggaranya sinergitas penanggulangan terorisme nasional		30.047.231,0
05.01	Jumlah Instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergitas penanggulangan terorisme	38	
06	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BNPT		1.208.719,0
06.01	Opini BPK atas laporan keuangan BNPT	WTP	
07	Meningkatnya kapasitas organisasi BNPT		11.181.821,0
07.01	Nilai kapasitas organisasi	100	
08	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Biro Umum		97.789.649,0
08.01	Nilai manajemen perubahan	2,89	











KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOJA								
	052 - Penghapusan Barang Milik Negara	Pusat	Pusat								14.010,0
	053 - Pengawasan dan Monitoring Barang Milik Negara	Pusat	Pusat								14.010,0
											102.122,0
08.EBA.962	Layanan Umum	Pusat	Pusat						000 - Bukan Tematik		102.122,0
											8.084.270,0
	051 - Layanan Umum										8.084.270,0
		Pusat	Pusat								8.084.270,0
08.EBA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		89.064.921,0
											55.290.653,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										55.290.653,0
		Pusat	Pusat								55.290.653,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										33.774.268,0
		Pusat	Pusat								33.774.268,0
											33.774.268,0
											179.559.520,0
											<b>Total</b>

**B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)**

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)				
						TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)				
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024
01	Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian	7	Layanan/Laporan/Dokumen		3.363.762,0				3.533.674,0	3.526.186,0	3.610.747,0		
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/Laporan/Dokumen		3.363.762,0				3.533.674,0	3.526.186,0	3.610.747,0		
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		3.363.762,0	1	1	1	3.533.674,0	3.526.186,0	3.610.747,0		
01.EBA.957.051	Melakukan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum	1,0	Layanan		2.308.175,0	1,0	1,0	1,0	2.467.215,0	2.448.742,0	2.522.205,0		
01.EBA.957.052	Melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jaringan Data dan Informasi Hukum	1,0	Layanan		928.779,0	1,0	1,0	1,0	938.345,0	948.010,0	957.775,0		

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	TAHUN 2022					PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)				
						VOLUME / TARGET					ALOKASI (RIBU)				
						2023	2024	2025	2023	2024	2025				
01.EBA.957.053	Melakukan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1,0	Layanan	126.808,0	126.808,0	1,0	1,0	1,0	128.114,0	129.434,0	130.767,0				
02	Terwujudnya BNPT yang akuntabel sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan Hukum dan Humas				2.061.381,0				2.103.167,0	2.146.000,0	2.189.908,0				
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/Laporan/Dokumen		2.061.381,0				2.103.167,0	2.146.000,0	2.189.908,0				
02.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		2.061.381,0	1	1	1	2.103.167,0	2.146.000,0	2.189.908,0				
02.EBA.963.051	Melakukan Pengolahan Data dan Informasi	1,0	Layanan	568.633,0	568.633,0	1,0	1,0	1,0	574.490,0	580.407,0	586.385,0				
02.EBA.963.052	Melakukan Penyusunan laporan	1,0	Layanan	223.200,0	223.200,0	1,0	1,0	1,0	225.499,0	227.822,0	230.168,0				
02.EBA.963.053	Melakukan Penyusunan Aplikasi Database Laporan	1,0	Layanan	226.213,0	226.213,0	1,0	1,0	1,0	228.543,0	230.897,0	233.275,0				
02.EBA.963.054	Melakukan Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,0	Layanan	1.043.335,0	1.043.335,0	1,0	1,0	1,0	1.074.635,0	1.106.874,0	1.140.080,0				
03	Terselenggaranya layanan publik BNPT yang prima				29.362.757,0				30.236.617,0	31.136.624,0	32.063.557,0				
03.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/Laporan/Dokumen		29.362.757,0				30.236.617,0	31.136.624,0	32.063.557,0				
03.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan		29.362.757,0	1	1	1	30.236.617,0	31.136.624,0	32.063.557,0				
03.EBA.958.051	Penyelenggaraan Koordinasi Kehumasan	1,0	Layanan	738.052,0	738.052,0	1,0	1,0	1,0	760.193,0	782.999,0	806.489,0				
03.EBA.958.052	Penyelenggaraan Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1,0	Layanan	2.031.832,0	2.031.832,0	1,0	1,0	1,0	2.092.786,0	2.155.570,0	2.220.237,0				
03.EBA.958.053	Penyelenggaraan Fasilitas Rapat Pimpinan, Kelompok Ahli, dan Kegiatan Strategis Lainnya	1,0	Layanan	356.350,0	356.350,0	1,0	1,0	1,0	360.020,0	363.729,0	367.475,0				
03.EBA.958.054	Penguatan Opini Publik dan Pembinaan Media Massa	1,0	Layanan	22.256.000,0	22.256.000,0	1,0	1,0	1,0	22.923.680,0	23.611.390,0	24.319.732,0				
03.EBA.958.055	Penggalangan Media Digital dan Komunikasi Virtual	1,0	Layanan	3.980.523,0	3.980.523,0	1,0	1,0	1,0	4.099.938,0	4.222.936,0	4.349.624,0				
04	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai tugas dan fungsi Biro Perencanaan, Hukum dan Humas				4.544.200,0				2.844.755,0	2.930.098,0	3.018.001,0				
04.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24	Dokumen/Layanan/Laporan		4.544.200,0				2.844.755,0	2.930.098,0	3.018.001,0				
04.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Dokumen		4.544.200,0	4	4	4	2.844.755,0	2.930.098,0	3.018.001,0				
04.EBD.952.051	Menyusun Renja BNPT Tahun Anggaran 2023	1,0	Dokumen	2.062.086,0	2.062.086,0	1,0	1,0	1,0	541.858,0	558.114,0	574.857,0				
04.EBD.952.052	Merencanakan Pelaksanaan Anggaran	1,0	Dokumen	1.525.594,0	1.525.594,0	1,0	1,0	1,0	911.157,0	938.492,0	966.647,0				
04.EBD.952.053	Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022	1,0	Dokumen	537.990,0	537.990,0	1,0	1,0	1,0	670.677,0	690.797,0	711.521,0				
04.EBD.952.054	Menyusun RKA-KL Tahun Anggaran 2023	1,0	Dokumen	418.530,0	418.530,0	1,0	1,0	1,0	721.063,0	742.695,0	764.976,0				

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	
05	Terseleenggaranya sinergisitas penanggulangan terorisme nasional				30.047.231,0					30.955.921,0	31.799.065,0	32.666.622,0
05.PEA	Koordinasi	25	kegiatan		30.047.231,0					30.955.921,0	31.799.065,0	32.666.622,0
05.PEA.001	Sasaran Wilayah Pelibatan Secara Terpadu Kementerian dan Lembaga K/L Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme	22	kegiatan		25.749.678,0	22	22	22	22	26.614.103,0	27.412.526,0	28.234.902,0
05.PEA.001.051	Melaksanakan Koordinasi Kementerian/Lembaga pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme Tingkat Pusat	10,0	Kegiatan	1.467.951,3	14.679.513,0	10,0	10,0	10,0	10,0	15.119.898,0	15.573.495,0	16.040.700,0
05.PEA.001.052	Melaksanakan Pelibatan Secara Terpadu Kementerian/Lembaga pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme Di Daerah	10,0	Kegiatan	1.107.016,5	11.070.165,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11.494.205,0	11.839.031,0	12.194.202,0
05.PEA.002	Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	3	kegiatan	4.297.553,0	4.297.553,0	3	3	3	3	4.341.818,0	4.386.539,0	4.431.720,0
05.PEA.002.051	Koordinasi Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pencegahan Terorisme	1,0	Kegiatan	4.297.553,0	4.297.553,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4.341.818,0	4.386.539,0	4.431.720,0
06	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BNPT				1.208.719,0					1.282.330,0	1.320.800,0	1.320.800,0
06.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24	Dokumen/Layanan/Laporan		1.208.719,0					1.282.330,0	1.320.800,0	1.320.800,0
06.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	20	Dokumen		1.208.719,0	20	20	20	20	1.282.330,0	1.320.800,0	1.320.800,0
06.EBD.955.051	Menyusun Laporan Keuangan	1,0	Laporan	278.750,0	278.750,0	1,0	1,0	1,0	1,0	295.726,0	304.598,0	304.598,0
06.EBD.955.052	Melakukan Pendampingan Pada Unit Teknis	1,0	Dokumen	252.500,0	252.500,0	1,0	1,0	1,0	1,0	267.877,0	275.914,0	275.914,0
06.EBD.955.053	Melakukan Update Data Rekonsiliasi Laporan Penyerapan GPP dan Tunjangan Pegawai	1,0	Laporan	161.526,0	161.526,0	1,0	1,0	1,0	1,0	171.363,0	176.504,0	176.504,0
06.EBD.955.054	Melakukan Penyusunan Pelaporan Verifikasi Pervabkeu	1,0	Laporan	385.519,0	385.519,0	1,0	1,0	1,0	1,0	408.997,0	421.267,0	421.267,0
06.EBD.955.055	Melaksanakan Pelaksanaan Bimbingan Tata Kelola Keuangan	1,0	Kegiatan	82.268,0	82.268,0	1,0	1,0	1,0	1,0	87.278,0	89.896,0	89.896,0
06.EBD.955.056	Melakukan Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1,0	Laporan	48.156,0	48.156,0	1,0	1,0	1,0	1,0	51.089,0	52.621,0	52.621,0
07	Meningkatnya kapasitas organisasi BNPT				11.181.821,0					11.361.364,0	11.637.572,0	11.921.399,0
07.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/Laporan/Dokumen		2.448.899,0					2.474.123,0	2.499.606,0	2.525.352,0
07.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		2.448.899,0	1	1	1	1	2.474.123,0	2.499.606,0	2.525.352,0







KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022												
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL		
07.EBC.954.053	Melakukan Diseminasi Peraturan Kepegawaian	Utama	35.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.910,0
07.EBC.954.054	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	Utama	6.537.276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.537.276,0
07.EBC.954.055	Melakukan pengadaan cpns	Utama	1.397.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.397.095,0
08	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Biro Umum		97.789.649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97.789.649,0
08.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		97.789.649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97.789.649,0
08.EBA.956	Layanan BMN		640.458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640.458,0
08.EBA.956.051	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Utama	524.326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524.326,0
08.EBA.956.052	Penghapusan Barang Milik Negara	Utama	14.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.010,0
08.EBA.956.053	Pengawasan dan Monitoring Barang Milik Negara	Utama	102.122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102.122,0
08.EBA.962	Layanan Umum		8.084.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.084.270,0
08.EBA.962.051	Layanan Umum	Utama	8.084.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.084.270,0
08.EBA.994	Layanan Perkantoran		89.064.921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89.064.921,0
08.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	55.290.653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.290.653,0
08.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	33.774.268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.774.268,0
	<b>Total</b>		<b>179.559.520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>179.559.520,0</b>

Jakarta, November 2021

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Bambang Surono, Ak., M.M.  
NIP. 166705011989031001





KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022												
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL		
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.263.717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.263.717,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal		2.263.717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.263.717,0
01.EBD.965.051	Melakukan audit Internal	Utama	169.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169.056,0
01.EBD.965.052	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan	Utama	598.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598.090,0
01.EBD.965.053	Melakukan Reviu Laporan Keuangan, Kinerja, RKA K/L, RK BMN dan Pengendalian Intern	Utama	290.921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290.921,0
01.EBD.965.054	Melakukan Evaluasi LAKIP, Reformasi Birokrasi, SPIP, dan Penerapan Anggaran	Utama	322.441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322.441,0
01.EBD.965.055	Melakukan Pengawasan Internal Lainnya	Utama	883.209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	883.209,0
	<b>Total</b>		<b>2.263.717,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.263.717,0</b>

Jakarta, November 2021  
a/n Menteri/ Kepala Lembaga  
Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

  
Bangsan Drono, Ak., M.M.  
NIP. 196705011989031001